



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini, peneliti akan menjelaskan alasan yang menjadi permasalahan atau latar belakang masalah pada penelitian ini terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah. Latar belakang ini juga akan memaparkan riset penelitian dan fenomena baru yang disajikan berdasarkan data yang terkait. Latar belakang ini akan mengarah pada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan uraian singkat yang diakhiri dengan masalah yang dipertanyakan. Selain itu ada batasan penelitian yaitu kriteria yang digunakan untuk merealisasikan penelitian seperti waktu, tempat dan data obyek.

Selanjutnya adalah rumusan masalah yang merupakan inti masalah yang menjadi fokus peneliti. Setelah rumusan masalah, kemudian membahas tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian yang dilaksanakan. Terakhir, adalah manfaat penelitian yang merupakan uraian mengenai manfaat penelitian ini kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam segi pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, yang terdiri dari kabupaten atau kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahannya dalam meningkatkan keefisienan dan keefektifitasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta layanan publik. Dengan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik Institut Bina Sarana Informatika Kwik Kian Gie

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



otonom dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan daerah otonom serta kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah yang berdasarkan desentralisasi, desentralisasi ialah penyerahan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengurus pemerintahannya atau daerahnya dengan pembangunan. Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di setiap daerah tersebut. Dengan hal itu, Pendapatan Asli daerah memegang peran penting, apabila pendapatan semakin tinggi maka semakin tinggi kemandirian daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut pemerintah daerah yang akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut dan digunakan untuk memajukan daerahnya. Pajak daerah ialah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dijadikan sebagai ukuran untuk melihat tingkat kemandirian pemerintah daerah. Dengan hal itu, maka pemerintah harus meningkatkan sumber potensi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah supaya target terealisasi serta pemerintah dapat melakukan pembangunan di daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain. Dari sumber pendapatan asli daerah tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Parkir. Dengan ini menunjukkan bahwa peran pajak daerah sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah harus memaksimalkan pendapatan pajak daerah agar penerimaan pendapatan daerah mengalami peningkatan.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta memeriksa kembali untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2020 untuk menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 28 triliun dikarenakan mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena adanya masa pandemi covid dan pemerintah menetapkan adanya kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menurunkan penyebaran virus covid-19. Pada saat pemerintah menetapkan PSBB, pendapatan asli daerah DKI Jakarta diproyeksikan mengalami penurunan drastis hingga 54% dari 57,5 triliun menurun menjadi 26,4 triliun. Dari pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan adalah pajak daerah dikarenakan adanya penutupan pada sektor usaha. Pemrov DKI menurunkan targetnya dari Rp. 50,17 triliun menjadi Rp. 22,5 triliun dengan presentase 45% dari target. Selain pendapatan asli daerah, retribusi daerah juga mengalami penurunan drastis dari target awal Rp. 755 miliar yang akhirnya dipatok menjadi Rp. 295 miliar turun dengan presentase sekitar 70%. Sementara itu pendapatan lain-lain yang sah seperti keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan bunga, serta penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro dipatok turun dari Rp. 5,8 triliun menjadi hanya Rp. 2,8 triliun. Seluruh sektor pendapatan asli daerah mengalami perlambatan, kecuali bagi hasil dividen badan usaha milik daerah atau komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tetap di angka Rp. 750 miliar. Komponen pajak daerah sangat mengalami penurunan yang signifikan karena disebabkan oleh faktor ditutupnya berbagai sektor usaha akibat adanya virus Covid-19 dan adanya peraturan pemerintah tentang kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Jakarta.bisnis.com).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



DKI Jakarta merupakan kota terbesar yang setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penduduk maka akan banyak sektor usaha yang meningkat seperti meningkatnya jumlah restoran, hotel, hiburan dan bangunan. Disamping meningkatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka secara tidak langsung jumlah kendaraan bermotor juga akan meningkat disetiap tahunnya sebagai alat transportasi penduduk sehari-hari.

Jumlah restoran pada saat ini semakin banyak dari berbagai jenis seperti rumah makan, cafe atau sejenisnya. Pada saat ini anak muda banyak mencari tempat yang nyaman untuk makan dan juga nongkrong. Dengan demikian maka akan mempengaruhi penerimaan pajak restoran. Semakin banyak pengunjung maka semakin banyak pendapatannya. Berdasarkan hasil penelitian dari (Rianto, 2021) bahwa Pajak Restoran berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2011-2015 sedangkan menurut penelitian (Wulandari & Kartika, 2021) Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019.

Banyaknya tempat wisata di DKI Jakarta membuat banyak wisatawan yang datang baik dari luar daerah maupun dari daerah. Wisatawan yang berasal dari luar daerah tentunya akan membutuhkan tempat sementara untuk beristirahat seperti hotel dan yang lainnya. Jumlah hotel semakin berkembang di daerah DKI Jakarta, semakin banyak yang menghuni hotel maka akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian (Rianto, 2021) bahwa Pajak Hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2011-2015. Sedangkan hasil penelitian (Wulandari & Kartika, 2021) Pajak Hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019



Kota Jakarta memiliki banyak sekali tempat hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat seperti bioskop, karaoke, pagelaran musik, pertandingan olahraga dan yang lainnya. Adanya tempat hiburan seperti diatas maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan dikarenakan adanya pungutan biaya saat menikmati hiburan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian (Deno et al., 2021) bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Namun berbeda dengan penelitian (Biringkane & Tammu, 2021) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DKI Jakarta terbatas akan sumber daya alam yaitu ruang terbuka (tanah). Kelangkaan ini akan menyebabkan barang atau jasa menjadi semakin mahal, dalam artian ini harga tanah dan bangunan semakin lebih mahal sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga menjadi meningkat. Jika setiap bangunan sudah dimiliki oleh orang lain, badan dan/atau pihak lain yang berpotensi dikenakan Pajak bumi dan bangunan maka harga akan lebih mahal. Meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akan menimbulkan kenaikan pada pajak daerah sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pada penelitian (Marta et al., 2020) bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 – 2019. Sedangkan menurut penelitian (Setiawati et al., 2021) bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang Hari.

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi beroda yang digunakan di jalur darat. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik jumlah kendaran bermotor meningkat drastis dari tahun 2019 dengan jumlah 11.839.921 unit kendaraan menjadi 20.221.821 unit kendaraan pada



tahun 2020. Banyaknya kendaraan akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian (Setiawan, 2021) Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrahwati et al., 2019) bahwa ada Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Tahun 2011-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah?
2. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah?
3. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah?
4. Apakah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah?
5. Apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Penelitian

Dikarenakan masalah yang diteliti sangat luas, maka peneliti membatasi penelitian sebagai

berikut:

1. Wilayah penelitian di DKI Jakarta.
2. Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2011-2020.
3. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta Tahun 2011-2020”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



2. Mengetahui apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Mengetahui apakah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
5. Mengetahui apakah penerimaan kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

F. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dan penerapan ilmu yang didapatkan selama berada di perkuliahan serta meningkatkan ilmu tentang pajak daerah terutama pada pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian dapat dijadikan referensi oleh peneliti di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie serta peneliti di kampus lain yang berkaitan dengan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

daerah terutama pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan informasi bagi para pembaca tentang pengaruh pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah mengenai pertumbuhan tentang pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak kendaraan bermotor agar pendapatan pajak daerah tumbuh dan Pendapatan Asli daerah teroptimalisasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.